

**EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENINGKATAN
EKONOM MASYARAKAT DI DESA SILALAH I, KECAMATAN
SILAHISABUNGAN**

Gabe Pos Matanari¹, Jhonson Pasaribu², Riana Lumbanraja³

Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: gabematanari45@gmail.com

Email: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id; riana.lumbanraja@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of BUMDes which was established in 2022 based on Village Regulation Number 6 of 2014 concerning BUMDes. This study uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach. BUMDes is a village-owned economic body or institution established by the village government to advance the village economy and improve the welfare of the community in accordance with Permendes no. 6 of 2018. Performance evaluation criteria according to Laster and Stiwert (2020) 6 evaluation criteria according to Laster and Stiwert, namely, Relevance, efficiency, effectiveness, learning and impact. The results of the study indicate that the BUMDes Silalahi I program is relevant to be implemented in Silalahi I Village, but in its implementation there is still a lack of relevance between the program and the government, then the lack of effectiveness in the BUMDes program, causing obstacles in implementing the program in assessing BUMDes performance, lack of good cooperation between BUMDes and the community.

Keywords: Evaluation, Performance, Village-Owned Enterprises

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BUMDes yang didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang BUMDes. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. BUMDes merupakan suatu badan atau lembaga perekonomian milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa untuk memajukan perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Permendes no.6 tahun 2018. kriteria Evaluasi kinerja menurut Laster dan Stiwert (2020) 6 kriteria Evaluasi menurut Laster dan Stiwert yaitu, Relevansi, efisiensi, efektivitas, pembelajaran dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BUMDes Silalahi I, sudah Relevan untuk dijalankan di Desa silalahi I, namun dalam pelaksanaannya masih kurangnya Relevansi antara program dengan pemerintah, selanjutnya Efektivitas kurangnya Efektivitas dalam program bumdes sehingga menimbulkan kendala –kendala dalam menjalankan program dalam penilaian kinerja bumdes kurangnya kerjasama yang baik antara bumdes dan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Badan Usaha Milik Desa.

PENDAHULUAN

Bumdes adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Ini merujuk pada lembaga ekonomi yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat desa. Konsep Bumdes berkaitan erat dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui usaha pengelolaan yang dimiliki secara kolektif oleh warga desa. Tujuan utama dari Bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan keberlanjutan ekonomi di tingkat desa, dan mengurangi disparitas pembangunan antara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



wilayah perkotaan dan pedesaan. pasal 69 Ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : “Pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.”Selain itu, UU Desa juga mengatur lebih lanjut tentang peran, fungsi, dan mekanisme pembentukan Bumdes, serta memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pengembangan Bumdes di tingkat desa. Desa Silalahi I,Kecamatan sialahisabungan, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, dan Bumdes diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi lokal.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dipahami sejauh mana kinerja Bumdes saat ini, kendala-kendala yang mungkin dihadapi, dan upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan.saat ini Bumdes Silalahi I tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat silalahi I dalam meningkatkan perekonomian desa untuk mengelola sumber daya alam desa , ada 4 sub unit usaha yang dikelolah bumdes pada tahun 2023 seperti,(1),pondok wisata (Home stay) (2)Penyewaan spikboat (3) Penampungan air bersih (4)UMKM Bawang Goreng.

Tujuan peneliti mengagkat judul ini untuk mengevaluasi bumdes silalahi I, mencari apa kendala yang dihadapi bumdes Silalahi I dalam mengelola sumber daya lokal yang sangat berpotensi dalam peningkatan ekonomi masyarakat Silalahi, dan untuk mengurangi pengangguran serta menjadi acuan dan perbaikan untuk kedepannya dalam menjalankan pengelolaan Bumdes. Desa sebagai unit paling dasar di tengah-tengah masyarakat memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi rakyat Meskipun telah ada kebijakan pemerintah untuk mendorong pembentukan Bumdes, namun masih terdapat kesenjangan pengetahuan tentang sejauh mana Bumdes dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bumdes dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial masyarakat desa. Beberapa persoalan dalam pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BUMDes Silalahi I, karena kurangnya keterlibatnya masyarakat desa dalam menjalankan program tersebut. Pelaksanaan setiap program yang ada hanya melibatkan satu orang saja, tidak dijalankan secara bergiliran untuk masyarakat desa. Selain itu penghasilan yang dihasilkan dari program usaha belum mencapai target sehingga perlu dievaluasi.

Peran BUMDes menurut Kusuma (2014) yaitu membangun dan mengembangkan kapasitas perekonomian masyarakat desa, memajukan perekonomian desa dan berupaya meningkatkan kapasitas pekerjaan manusia dan masyarakat, memperkuat ekonomi masyarakat menjadi kesatuan dan kekuatan dalam perekonomian nasional, BUMDes bagian dari suatu pondasinya. 3 Sistem pengelolaan BUMDes yaitu dengan kejujuran, keterbukaan, berpartisipasi dan adil. BUMDes berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai penggerak peningkat perekonomian desa dan sebagai usaha pendapatan asli desa (Dewi, 2014). Hal ini menjadi dasar dalam mengukur kinerja BUMDes.Dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah adalah dengan membentuk sistem otonomi desa.Pembangunan di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting karena cakupan wilayah pembangunan di Indonesia sangat luas.

Pembangunan nasional merupakan hasil integrasi dari pembangunan-pembangunan di desa yang serasi, terpadu, berdaya guna serta berhasil guna(Adisasmita, 2006).Sesuai dengan amanat Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal.Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diupayakan dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa yang kemudian disebut sebagai dana desa.

Salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Penggunaan Dana Desa tahun 2019 pasal 10 ayat 2i, yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mendukung permodalan pembentukan BUMDes(PERMEN 2018).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mendefinisikan BUMDes adalah sebuah badan usaha yang modalnya (sebagian atau seluruh) dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa(Permen 2015).Hal ini diperkuat dengan penelitian Purnama dan Ramadani (2015) Evaluasi Program BUMDes yang telah didirikan belum efektif dan partisipasi masyarakat yang rendah. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian terdahulu, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bumdes Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Silalahi I,Kecamatan SilahiSabungan.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berupa temuan-temuan yang tidak melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lain yang berkaitan dengan jumlah. Selanjutnya metode kualitatif adalah metode analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif bersifat mengetahui makna, keunikan dan memahami bentuk fenomena serta menemukan hipotesis dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji sebuah masalah sosial yang kompleks dan dinamis guna untuk dijadikan penyelesaian suatu masalah yang bersifat fakta/realita. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. Dengan metode ini penulis bisa memberikan gambaran umum mengenai evaluasi kinerja BUMDes terhadap peningkatan perekonomian Desa di Desa Silalahi I,Kecamatan silahisabungan,Kab.Dairi.

PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa atau masyarakat setempat .BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan cara mengelolah sumber daya alam ,potensi lokal,dan usaha ekonomi lainnya yang ada didalam desa tersebut. Amien widodo, seorang ahli ekonomi pembangunan menekankan pentinnya peran BUMDes dalam mendukung diversifikasi usaha. BUMDes dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ada beberapa poin yang dapat menjadi dasar kajian teori BUMDes yaitu :

1. Tujuan dan visi BUMDes
meninjau tujuan dan visi awal pembentukan BUMDes.Evaluasi kinerja harus mempertimbangkan sejauh mana Bumdes mencapai tujuan dan visi tersebut.
2. Aspek keuangan
analisis keuangan BUMDes termasuk pendapatan ,pengeluaran,dan profitabilitas evaluasi dapat mencakup penilaian terhadap keberlanjutan keuangan Bumdes.
3. Manajemen sumber daya manusia
meninjau kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia di BUMDes evaluasi dapat ,melibatkan analisis struktur organisasi ,kompetisi sdm dan strategi pengembangan SDM.
4. Pengelolah usaha
meninjau bagaimana Bumdes mengelolah usaha-usahanya evaluasi dapat mencakup diversifikasi usaha ,strategi pemasaran,dan inovasi produk dan layanan.
- 5 Partisipasi masyarakat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



evaluasi dapat memeriksa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dukungan terhadap keberlanjutan Bumdes.

Teori Evaluasi Pengembangan (E. Jane Davidson)

Penting untuk diingat bahwa kajian teori harus disesuaikan dengan konteks lokal dan karakteristik khusus BUMDes yang sedang dievaluasi. Selain itu, keterlibatan stakeholder lokal dan pihak terkait juga perlu diperhatikan dalam proses evaluasi kinerja BUMDes menurut Robert Stake bahwa mengembangkan pendekatan evaluasi yang dikenal "*Countenance Stake's Responsive Evaluation*." Stake menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan mengakui keberagaman perspektif yang mungkin berfokus pada pembelajaran dan pengembangan melalui evaluasi. Menekankan pada peran evaluasi dalam mendukung pembelajaran dan pengembangan kapasitas, ketelitian dan kehandalan instrumen pengukuran dalam mengumpulkan data evaluasi. Penting untuk dicatat bahwa teori-teori ini mencerminkan berbagai pendekatan dan filosofi terhadap evaluasi, dan penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada konteks evaluasi yang spesifik (Robert L. Linn).

Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan badan usaha yang semuanya atau sebagian besar yang mempunyai modalnya ialah desa melalui penyertaan secara langsung yang berwal dari kekayaan desa yang dipisahkan agar dapat mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan BUMDes juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mencakup beberapa hal sebagai berikut : Bumdes merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa.

Landasan Hukum Bumdes

Dalam Hal ini yang menjadi landasan hukum pendirian atau pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- b. BUMDes berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan pembentukan BUMDes dijelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Bab X Badan Usaha Milik Desa pasal 87 yang berbunyi;

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 selain dapat membentuk BUMDes dimasing-masing Desa, masyarakat juga boleh mendirikan BUMDes Bersama untuk memajukan perekonomian Desa.

BUMDes Bersama ialah suatu kegiatan yang dilakukan satu desa atau lebih, yang dana atau modalnya dimiliki oleh desa itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang telah diatur diatas masih ada yang lebih rinci tentang BUMDes yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 dan Permen Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015.

Tujuan Bumdes

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk, diantaranya:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5



- a. Memajukan ekonomi Desa
- b. Memajukan pendapatan asli Desa
- c. Memajukan usaha masyarakat dalam mengurus kapasitas ekonomi Desa
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Permen Desa PDTT nomor 4 tahun 2015 juga menjelaskan yang berkenaan dengan tujuan pembentukan BUMDes. Pasal 3 menjelaskan tujuan pembentukan BUMDes yang mana meningkatkan perekonomian Desa, pendapatan Desa, mengoptimalkan aset-aset milik Desa dalam memajukan penghasilan masyarakat serta potensi Desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cara Mendirikan Bumdes

BUMDes merupakan salah kegiatan yang didirikan masyarakat Desa dan aparaturnya Desa sesuai dengan kriteria yang ada di Desa. Dalam mendirikan BUMDes adanya proses yang harus dipersiapkan oleh Desa antara lain yaitu:

1. Sosialisasi BUMDES kepada masyarakat.
2. Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDES
3. Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha.
4. Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat.
5. Penyusunan AD/ ART dan Raperdes.
6. Sosialisasi Draft AD/ART dan Raperdes.
7. Memilih kepengurusan BUMDES
8. Sumber permodalan BUMDES

Evaluasi BUMDes

Evaluasi juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Penjelasan ini, bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan hasil kebijakan publik dimana pada kenyataannya yang memiliki nilai atau hasil dengan tujuan dan sasaran kebijakan publik (Laster dan Stewart dalam (Hayat, dkk.2018). Evaluasi ditunjukkan untuk melihat bagaimana melihat kegagalan suatu kebijakan publik dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan menghasilkan target yang telah diinginkan. Menurut Sudirjo dalam (Rahmawati dan Amar, 2017). Dilihat dari pengertian evaluasi tersebut dapat ditetapkan bahwa evaluasi adalah penilaian aktivitas seseorang dalam melihat kegiatan yang dilakukan apakah sudah mencapai target atau belum. Dapat disimpulkan, dari penjelasan diatas bahwa evaluasi merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menemukan suatu hasil yang telah dikerjakan, tercapainya target yang diinginkan atau tidak. Dalam evaluasi kinerja bumdes di Desa Silalahi I terdapat beberapa masalah yang ditemukan dilapangan dimana keikutsertaan masyarakat tidak ada dalam menjalankan program bumdes itu sehingga program yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari program itu yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa dan juga mensejahterakan masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan. Dapat disimpulkan kurangnya relevansi dari BUMDes Silalahi I dalam menjalankan program sehingga terjadi kegagalan bumdes dalam mengelola usaha yang berpotensi menambah pendapatan Desa dan juga mengurangi pengangguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti dapat menyimpulkan dari BUMDes Silalahi I untuk peningkatan ekonomi di Desa Silalahi bahwa pelaksanaan program BUMDes dari 4 program masih 2 yang berjalan yaitu penyewaan Speedboat dan Home stay dikarenakan kurangnya dana yang dibutuhkan dan juga kurangnya kerja sama antara bumdes dan pemerintah serta tidak dilibatkannya masyarakat Desa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Silalahi I dalam menjalankan program dimana masyarakat mampu membantu dari segi tenaga dan juga akses dalam mewujudkan Desa Silalahi menjadi desa wisata dan mempunyai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan melakukan evaluasi kinerja bumdes dalam peningkatan perekonomian peneliti dapat menjelaskan fakta –fakta yang terjadi dilapangan antara lain

1. BUMDes Silalahi I dalam menjalankan program BUMDes belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan kendala internal dan juga kendala eksternal didalam ruang lingkup bumdes dalam merealisasikan program .dari 5 kriteria menurut Laster dan Stiwert bahwa dalam evaluasi bumdes mengenai relevansi dimana relevansi terdapat tidak sesuai perencanaan dengan program yang dirancang oleh bumdes.begitu juga dengan efektifitas,terdapat permasalahan tidak tercapainya perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas tidak tercapainya hasil yang maksimal yang telah ditargetkan.sama halnya dengan efisiensi dalam evaluasi bumdes bahwa BUMDes Silalahi I belum dapat memanejemen waktu dan juga keuangan sehingga sulit dalam mencapai tujuan.selanjutnya dampak dalam program BUMDes Silalahi I yaitu ketika program bumdes tidak terlaksana maka BUMDes dapat dikatakan gagal dalam mengelola bumdes .Dampak positif dari program bumdes yaitu Desa Silalahi I akan semakin maju dan juga dapat mengurangi pengangguran didesa Silalahi I.selanjutnya pembelajaran dan adaptasi dalam evaluasi kinerja BUMDes dimana ketika program BUMDes Silalahi I itu berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja bumdes di beberapa tahun yang akan datang dengan adanya pembelajaran dan adaptasi dalam evaluasi kinerja BUMDes ini maka akan mengetahui kesalahan dan kegagalan apa yang perlu menjadi pembelajaran untuk perbaikan kedepan agar bumdes menjadi lebih baik lagi dan mampu menganalisis masalah –masalah yang terjadi saat ini didalam bumdes yang mengakibatkan program bumdes tidak berjalandengan maksimal sesuai dengan perencanaan.
2. Dalam pelaksanaan program BUMDes Silalahi I.adanya kendala –kendala yang dihadapi oleh bumdes Silalahi I dimana kendala tersebut dapat menghambat berjalannya program bumdes yang dapat meningkatkan perekonomian desa dimana kendala internal dalam BUMDes itu seperti kurangnya kerjasama sama antara pengurus BUMDes sehingga terjadi membuat pengurus BUMDes tidak satu tujuan dalam melaksanakan program.dan kendala eksternal bumdes dimana masyarakat tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kurangnya transparansi program kepada masyarakat Silalahi Isehingga menimbulkan stigma negatif terhadap program BUMDes Silalahi I sehingga kendala yang terdapat dalam bumdes itu menjadi efek negatif bagi pemerintah Desa terlebih kepada BUMDes Silalahi I.

REFERENSI

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan ilmu sosial lainnya*.Jakarta :Prenada Media Group.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. (2014). ” *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PEDES) Serta Menumbukan Perekonomian Desa*” Dalam *Journal Of Rural And Development*. Vol V No. 1 Februari 2014. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Fathoroni, Annisa, dkk. (2020). *Buku Tutorial Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Menggunakan Metode 360 Degree Feedback*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Laundry, Dieky. (2019). *Analisis Kompetensi Pengelolaan BUMDES Terhadap KinerjaBUMDES Dengan Implementasi pengelolaan BUMDES Variabel Intervening*. “Skripsi” Bandar Lampung: Fakultas Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Purnama, Ramdhani, (2019). *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas perberdayaan Pemberdayaan masyarakat Di Kota Karawang. "Jurnal"*, vol 4. 19-29 Hal. Politikom Indonesia.
- Hayat, dkk. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahmawati, B. Fitri dan Syahrul Amar. 2017. *Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Lombok Timur: Universitas Hamzanwadi Press.
- Robert Stake : Stake, Robert E. , (2004) *Standards-Based & Responsive Evaluation*. California: Sage Publication,
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Sulaiman, Abdul R. dkk. 2020 *Yayasan Kita Menulis. BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan.
- Sundari ,(2019) *Analisis Efisiensi biaya operasional Terhadap Tingkat Pendapatan usaha jual beli pisang dikabupaten gowa. "skripsi" Makassar .Jurusan ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar*.
- Sopiyantul hikmah, (2020) *Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.Studi Kasus Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa : "Skripsi" Mataram. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*
- Saputra,Yoga. (2019). *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijan Lestari Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Taman sari Kecamatan LicinKabupaten Banyuwangi. "Skripsi" Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember*.
- Vian Dwi Lestari, (2023), *Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara vol.5.no.1. Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara, Jl. Mastrip No. 59 Blitar, 66111, Jawa Timur*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX

